# BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi penjabaran mengenai lingkungan ekonomi dari obyek yang diteliti serta situasi yang menjadi topik penelitian dalam merumuskan masalah. Kedua adalah identifikasi masalah merupakan uraian dalam bentuk paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah yang dipertanyakan. Ketiga adalah batasan masalah yaitu kriteria-kriteria untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat adalah batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian (dalam keterbatasan realistis, seperti aspek waktu, tempat, data obyek) dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.

Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah (ruang lingkup masalah) yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, setelah rumusan masalah berikutnya membahas mengenai tujuan penelitian yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, bagian terakhir pada pendahuluan adalah mengenai manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

## Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. (Toding ,2016)

Indonesia adalah Negara yang besar yang terbagi atas daerah provinsi , yang terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota , setiap daerah tersebut mempunyai kewajiban untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah .Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yan g baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. (Kobandaha, 2016)

Menurut Undang – Undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan asli daerah memiliki 4 sumber yaitu Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lain – lain PAD yang sah .Dengan Pajak daerah yang memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan PAD . Berdasarkan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta menunjukkan bahwa 57,01% sumber pendapatan daerah berasal dari Pajak Daerah untuk tahun 2017 (apbd.jakarta.go.id).

Pajak Daerah yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari 13 jenis pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Parkir (Anggraeni, 2010).

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefenisikan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten yang ada di provinsi DKI Jakarta. (Rompis, 2015)

Pada saat ini harga mobil di Jakarta semakin meningkat, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli mobil bekas, hal ini tentunya bisa meningkatkan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli , tukar menukar , hibah , warisan , atau pemasukan ke dalam badan usaha . Subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau barang yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan KB dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Penguasaan kendaraan melebihi 12 bulan diluar perjanjian sewa beli dapat dainggap sebagai penyerahan. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran (Eryandi, 2011).

Seiring dengan bertumbuhnya jumlah kendaraan bermotor, kebutuhan akan bahan bakar juga semakin meningkat sehingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pun semakin meningkat. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak yang dipungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yang juga pada saat ini merupakan jenis pajak yang penerimaanya terus meningkat.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta saat ini sedang membidik para penunggak pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan mewah. Sebanyak 4.362.800 kendaraan menunggak pajak dengan potensi pendapatan mencapai hingga Rp 1,6 triliun. Pada tahun 2017 realisasi pajak DKI sudah mencapai Rp 20,6 triliun. Capaian itu sudah meningkat dibandingkan dengan realisasi pada bulan yang sama tahun 2016, yaitu Rp 17,3 triliun. Adapun total target penerimaan pajak daerah pada 2017 mencapai Rp 35,2 triliun. Masih ada banyak penunggak pajak, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB). Saat ini BPRD bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya untuk menagih tunggakan pajak dan upaya penegakan hukum di jalan raya, data kendaraan mewah yang menunggak pajak di Jakarta ada 1.700 unit. Kendaraan mewah itu di antaranya sepeda motor dan mobil mewah. Adapun nilai pajak yang belum dibayar mencapai Rp 400 miliar.Pajak kendaraan mewah dikenai 2 persen dari harga mobil untuk kepemilikan mobil pertama. Adapun untuk mobil kepemilikan kedua dikenai tarif pajak progresif 2,5 persen atau naik 0,5 persen dari pajak kendaraan pertama. Tarif progresif 0,5 persen itu berlaku hingga kepemilikan kendaraan ke-17. Adapun denda pajak telat bayar 2 persen dari nilai tunggakan. Maksimal denda yang diterapkan 2 tahun atau 48 persen dari pajak terutang ([pajakonline.com](http://www.pajakonline.com/)).

Kota Jakarta adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya Pajak Daerah di Jakarta, dengan bertambahnya pengguna kendaraan dan bertambahnya kebutuhan akan bahan bakar sehingga meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian-penelitian mengenai penerimaan Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD sudah cukup banyak dilakukan seperti:

Dari penelitian yang dilakukan Anggraini (2016) tentang pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di SUMSEL setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Wahfar (2014) tentang Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai penerimaan PAD mengambil kesimpulan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang dilakukan oleh Fayrusz (2014) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD, maka dapat ditarik kesimpulan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitian oleh Wijaya (2016) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014.Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2018) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD mendapatkan hasil bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Alasan penulis memutuskan untuk meneliti Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikarenakan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Jakarta tiap tahunnya , dengan bertambahnya jumlah penduduk maka dibutuhkan juga transportasi untuk penduduk tersebut . Pada saat ini pengguna kendaraan bermotor di Jakarta sudah sangat banyak dan terus bertambah tiap tahunnya sehingga potensi pemungutan pajaknya juga besar begitu pula dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor berarti kebutuhan akan bahan bakar juga akan bertambah dengan pesat, Dan juga banyaknya Masyarakat yang membeli mobil – mobil bekas yang bisa meningkatkan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor . Faktor – faktor tersebut tentunya dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara tidak langsung, karena dengan bertambahnya penduduk berarti bertambahnya juga peluang penerimaan – penerimaan pajak khususnya pajak daerah dengan,berdasarkan alasan tersebut maka penelitian ini dilakukan dan diberikan judul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor & Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan PAD DKI Jakarta pada periode 2008-2017” .

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , penulis mengidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Apakah penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Apakah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada wilayah DKI Jakarta
2. Penelitian dibatasi pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor periode 2008-2017.
3. Memperoleh data penelitian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah yang diambil maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas , yaitu : “Apakah Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta periode 2008-2017 ”.

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD DKI Jakarta periode 2008-2017.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD DKI Jakarta periode 2008-2017.
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap PAD DKI Jakarta periode 2008-2017.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku penelitian dan juga agar dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan terutama Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah .

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang pembahasannya terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta PAD.

1. Pemerintah Daerah

Sebagai gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Kendaraan Bermotor , Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor , dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara ekonomi dan finansial agar dapat mengoptimalisasi pertumbuhan Pajak Daerah guna mengoptimalisasi PAD DKI Jakarta.